

Implementasi Prosedur Audit Aset Tetap pada Perusahaan Sektor Jasa Pelayaran

Nurul Hidayah

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

R. Muh. Syah Arief Atmaja Wijaya*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Korespondensi: raden.ak@upnjatim.ac.id

Abstract. Fixed asset audit is one of the crucial elements in the financial statement examination process due to its material value and complex accounting treatment. This study aims to evaluate the implementation of fixed asset audit procedures by KAP DJS in a company within the maritime service sector. The method used is qualitative with a descriptive analytical approach covering the audit stages including planning, execution, and reporting. The results show that KAP DJS has applied audit procedures systematically in accordance with the Auditing Standards (SA). The fixed assets audited focused on ships and barges, which require specific testing related to existence, legality, and treatment of docking costs. However, there are limitations in the physical inspection process, which was only conducted on docked vessels, without applying alternative procedures such as verification through shipping logbooks or GPS tracking. Nonetheless, in general, the implementation of audit procedures by KAP DJS has been effective in detecting material misstatement risks and ensuring the fair presentation of fixed assets, although further segmentation is needed when testing movable assets.

Keywords: Fixed assets, audit evidence, auditing standards

Abstrak. Audit aset tetap merupakan salah satu elemen penting dalam proses pemeriksaan laporan keuangan karena menyangkut nilai yang material serta perlakuan akuntansi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan prosedur audit aset tetap oleh KAP DJS pada perusahaan sektor jasa pelayaran. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis terhadap tahapan audit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP DJS telah menerapkan prosedur audit secara sistematis sesuai dengan Standar Audit (SA). Aset tetap yang menjadi fokus audit adalah kapal dan tongkang yang membutuhkan pengujian khusus atas eksistensi, legalitas, serta perlakuan biaya *docking*. Meskipun demikian, terdapat keterbatasan pada pemeriksaan fisik yang hanya dilakukan pada kapal yang berlabuh tanpa menerapkan prosedur alternatif seperti verifikasi melalui logbook pelayaran atau GPS tracking. Namun secara umum, pelaksanaan prosedur audit oleh KAP DJS telah efektif dalam mendeteksi risiko salah saji dan memastikan kewajaran penyajian aset tetap, meskipun diperlukan perbagian dalam pengujian aset bergerak.

Kata kunci: Aset tetap, bukti audit, standar audit

LATAR BELAKANG

Audit laporan keuangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan tidak dapat dilewatkan. Kegiatan audit yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memeriksa keakuratan dari transaksi perusahaan (Ramadhany *et. al*, 2021). Menurut Mahadewi & Dwirandra (2022), keberadaan auditor independen berperan besar dalam meningkatkan kualitas audit. Dalam hal ini, audit tidak hanya berfungsi sebagai alat

Received: September 11, 2025; Revised: September 17, 2025; Accepted: September 24, 2025

*Corresponding author, e-mail address

verifikasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Sehingga, audit laporan keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan keandalan informasi keuangan perusahaan.

Audit memiliki peran penting dalam menjamin keakuratan informasi serta mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang efektif. Menurut Sandyardhita & Habibi (2024), prosedur audit yang diterapkan secara tepat dapat membantu auditor dalam mendeteksi ketidaksesuaian dalam pencatatan. Sementara itu, menurut Nurhaliza *et al.* (2021), efektivitas audit dipengaruhi oleh independensi auditor serta pengalaman yang dimiliki auditor memengaruhi pemahaman mereka terhadap karakteristik perusahaan yang diaudit. Hal ini menjadi sangat relevan untuk perusahaan yang memiliki aset bernilai besar dan berisiko tinggi. Sehingga, penerapan prosedur audit yang sistematis dan sesuai dengan standar dapat memastikan bahwa segala informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah terhindar dari salah saji material.

Laporan keuangan memiliki beberapa pos yang bernilai material, salah satunya adalah aset tetap. Menurut PSAK 216, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam aktivitas produksi, penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak ketiga, atau untuk kepentingan administrasi serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap menjadi komponen vital karena mencerminkan kekayaan perusahaan serta mendukung operasional jangka panjang perusahaan (Rohendi, 2017). Perlakuan akuntansi yang kurang tepat dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap manajemen perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Ketepatan dan keakuratan pencatatan menjadi hal yang krusial karena nilai aset yang cukup besar memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febriani *et al.* (2021), ditemukan adanya perbedaan perhitungan penyusutan antara pihak perusahaan dengan auditor. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan nilai buku yang dijadikan dasar antara perusahaan dengan auditor. Hal tersebut terjadi karena pada periode sebelumnya terdapat selisih perhitungan yang tidak dilakukan *adjsusment*, sehingga berpengaruh terhadap nilai yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh

Rochmawati (2021) ditemukan adanya kesalahan pengklasifikasian aset meliputi pembelian tinta, kertas hvs, hingga pembelian *youtube premium* yang seharusnya dicatat sebagai biaya inventaris kantor, namun perusahaan mencatat sebagai aset tetap. Temuan-temuan tersebut menegaskan peran penting auditor dalam mengidentifikasi pencatatan dan memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, proses audit yang dilakukan secara menyeluruh dan independen sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.

Prosedur audit yang dilakukan secara menyeluruh, memungkinkan auditor menemukan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang terjadi pada PT KAI, terdapat kasus korupsi penguasaan aset tetap dengan mengalihkan aset milik PT KAI yang ada di Kota Medan kepada pihak yang tidak berhak dan menerima kompensasi pembayaran (Batamtimes, 2025). Kasus ini menunjukkan bahwa kecurangan dalam pengelolaan aset tetap dapat terjadi apabila tidak ada pengawasan dan pemeriksaan yang ketat dari pihak internal maupun eksternal. Penerapan prosedur audit seperti pemeriksaan fisik, verifikasi dokumen kepemilikan, dan pengujian atas perlakuan akuntansi terhadap aset tetap dapat membantu auditor dalam mendeteksi indikasi *fraud* dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi perusahaan.

Penerapan prosedur audit yang sistematis dan tepat oleh auditor independen, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), menjadi krusial untuk menilai kewajaran akun aset tetap dan mendeteksi potensi kesalahan atau kecurangan. Menurut Prabawa *et al.* (2024), efektivitas prosedur audit yang ketat dapat meningkatkan akurasi dan reliabilitas dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. Tingkat pemahaman auditor dalam melakukan proses audit, menjadi salah satu kunci efektivitas kegiatan audit (Suci *et al.*, 2023). Pemahaman auditor terhadap proses audit aset tetap memungkinkan auditor untuk lebih kritis dalam menilai kewajaran metode penyusutan, masa manfaat aset, serta kebijakan lain yang digunakan oleh manajemen. Sehingga, keandalan hasil audit bergantung pada sejauh mana auditor menerapkan prosedur yang relevan dengan kompleksitas aset dan jenis industri yang terkait.

Auditor independen memiliki peranan penting dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Sebagai pihak yang independen, auditor bertanggungjawab untuk memberikan opini yang objektif mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Audit (SA) yang berlaku. Dalam

audit aset tetap, auditor independen melakukan prosedur seperti pemeriksaan fisik aset, verifikasi dokumen kepemilikan, perhitungan penyusutan, dan evaluasi kebijakan akuntansi (Nurcahyo & Winarto, 2022). Prosedur pengujian substantif yang dilakukan berdasarkan standar audit yang berlaku dapat menghasilkan temuan yang signifikan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan (Fauzan, 2021). Oleh karena itu, kompetensi auditor serta kepatuhan terhadap proses audit menjadi faktor kunci dalam menjamin kualitas audit.

Berdasarkan informasi tersebut diatas, kepatuhan pelaksanaan prosedur audit aset tetap menjadi poin penting untuk memastikan kewajaran pelaporan keuangan. Namun, beberapa studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas prosedur audit secara umum. Selain itu, belum banyak penelitian yang membahas pelaksanaan prosedur audit aset tetap pada perusahaan di sektor pelayaran, yang memiliki karakteristik aset yang unik seperti kapal dan alat bongkar muat yang memiliki nilai yang sangat material serta masa manfaat yang cukup panjang. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana prosedur audit aset tetap dilaksanakan pada perusahaan pelayaran, serta sejauh mana prosedur tersebut mampu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pencatatan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas audit aset tetap

KAJIAN TEORITIS

Aset Tetap

Aset tetap adalah bagian krusial dalam struktur laporan keuangan perusahaan. Mengacu pada PSAK 216, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam aktivitas produksi, penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak ketiga atau untuk kepentingan administrasi serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan menurut Ely & Sri (2009), aset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, memiliki manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, serta digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan perusahaan, serta tidak untuk dijual kembali. Aset tetap memiliki beberapa karakteristik, yaitu dibeli untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak untuk dijual kembali, memiliki masa manfaat yang panjang dan dilakukan depresiasi, memiliki substansi fisik, serta jumlahnya yang cukup material (Agoes, 2012:270).

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap tidak hanya sebesar nilai pembelian tetapi juga meliputi biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi yang diinginkan agar bisa digunakan sesuai dengan tujuannya (Smith & Skousen, 2003). Karena memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, maka perlu dilakukan pembebanan penyusutan atas penurunan nilai ekonomis aset tetap. Menurut Kieso *et al.* (2019), penyusutan merupakan proses alokasi sistematis dan rasional atas biaya perolehan aset tetap ke dalam beban selama masa manfaat ekonomis aset tersebut. Proses ini bertujuan untuk mencerminkan penurunan nilai manfaat aset secara akuntabel sepanjang periode penggunaannya. Dalam menentukan besarnya beban penyusutan, terdapat tiga elemen penting yang harus dipertimbangkan, yaitu harga perolehan, nilai residu, dan taksiran umur manfaat dari aset (Baridwan, 2011).

Berdasarkan PSAK 16 tahun 2020 tidak secara eksplisit mengelompokkan aset tetap ke dalam kategori tertentu, namun dalam akuntansi secara umum, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan sifat fisiknya. Perusahaan memiliki berbagai jenis aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, inventaris kantor, dan aset dalam penyelesaian. Setiap jenis aset memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Sehingga PSAK 16 tahun 2020, menuntut pengungkapan lengkap atas metode penyusutan, masa manfaat, dan nilai tercatat aset tetap yang dimiliki perusahaan.

Prosedur audit aset tetap

Audit merupakan proses yang dilakukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Sukrisno Agoes (2012:4) mendefinisikan audit sebagai kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis serta objektif terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi serta dokumen pendukung oleh auditor independen untuk memberikan opini mengenai kewajaran informasi keuangan tersebut. Sedangkan menurut Refitasari (2019), audit adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi suatu informasi dengan tujuan menilai apakah informasi tersebut sudah disajikan sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan.

Arens *et al.* (2017:168) menyatakan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan audit adalah untuk memberikan opini profesional terkait laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Opini tersebut bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan telah

disajikan secara wajar dalam semua aspek material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Audit juga berperan penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan tidak menyesatkan pengguna informasi keuangan.

Prosedur audit berisi langkah-langkah yang dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung opini atas kewajaran laporan keuangan (Ramadhany *et al.*, 2021). Dalam audit laporan keuangan, prosedur audit meliputi pengujian atas dokumen, wawancara, observasi, konfirmasi, rekalkulasi, dan prosedur analitis (Haniifah & Pramudyastuti, 2022). Menurut Arens *et al.* (2017), prosedur audit aset tetap dimulai dari tahap perencanaan audit hingga pelaporan.

1) Tahap Perencanaan Audit

Tahap perencanaan audit dimulai dengan memahami sistem pengendalian internal klien terkait proses perolehan, pencatatan, hingga pelepasan aset tetap. Pada tahap ini, auditor meninjau kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Auditor juga melakukan penilaian awal atas risiko salah saji material, baik yang bersifat inheren maupun risiko pengendalian untuk menentukan strategi audit yang sesuai. Dalam tahap perencanaan, auditor harus menetapkan tingkat materialitas dan jenis pengujian yang dilakukan. Penetapan materialitas didasarkan pada pertimbangan auditor mengenai informasi yang dianggap material bagi pengguna laporan keuangan (Waluyo & Wijaya, 2024).

2) Tahap Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pengendalian internal atas aset tetap berfungsi secara efektif. Untuk membuktikan bahwa pengendalian tersebut berjalan dengan baik, auditor perlu melaksanakan serangkaian prosedur pada tahap ini, antara lain:

- a. Pengujian terhadap sistem otorisasi pembelian dan penjualan aset.
- b. Menilai apakah pencatatan aset tetap telah dilakukan berdasarkan dokumen sumber yang valid seperti faktur atau kontrak pembelian.
- c. Mengevaluasi sistem dokumentasi aset tetap seperti kartu aset tetap serta mengevaluasi sistem pengamanan fisik aset tetap.

Hasil pengujian pengendalian berpengaruh pada proses pengujian selanjutnya. Apabila sistem pengendalian internal terbukti telah berjalan secara efektif, maka auditor dapat mengurangi tingkat pengujian substantif.

3) Tahap Pengujian Substantif

Pengujian substantif merupakan proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan keberadaan, kelayakan, dan kewajaran nilai aset tetap yang disajikan pada laporan keuangan. Beberapa pengujian substantif yang dilakukan dalam audit aset tetap yaitu:

a. Inspeksi fisik aset tetap

Pemeriksaan fisik terhadap aset yang tercatat dalam pembukuan sangat penting untuk dilakukan. Auditor secara langsung memverifikasi keberadaan dan kondisi fisik dari aset. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk:

- a. Memastikan bahwa aset benar-benar ada dan digunakan untuk operasional perusahaan.
- b. Menilai kondisi fisik aset tetap untuk menentukan apakah aset masih layak untuk digunakan atau membutuhkan penyesuaian nilai.
- c. Mengidentifikasi kemungkinan aset yang telah rusak, tidak digunakan, atau hilang namun masih tercatat dalam laporan keuangan perusahaan.

b. Pemeriksaan dokumen legal dan bukti kepemilikan

Auditor perlu memeriksa dokumen legal yang berkaitan dengan aset tetap seperti sertifikat tanah dan bangunan, BPKB dan STNK kendaraan, faktur atau invoice pembelian, surat perjanjian *leasing*, serta dokumen penghapusan maupun pelepasan aset. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan hak hukum perusahaan atas aset tersebut serta memverifikasi bahwa transaksi perolehan aset telah dicatat secara tepat dan sah.

c. Rekalkulasi penyusutan

Rekalkulasi penyusutan dilakukan untuk memastikan bahwa metode penyusutan yang digunakan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi dan diterapkan secara konsisten. Pengujian ini memiliki tujuan dalam memastikan bahwa umur manfaat dan nilai residu yang ditetapkan sudah wajar dan realistik. Pengujian ini penting karena kesalahan dalam menentukan besaran penyusutan dapat mengakibatkan overstatement maupun understatenebt pada beban penyusutan, laba bersih, dan

nilai tercatat aset. Sehingga, pengujian ini mendukung asersi penilaian dan penyajian.

d. Penelaahan kebijakan akuntansi

Auditor perlu menelaah dan mengevaluasi kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap aset tetap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menilai apakah aset tetap disajikan secara wajar dalam laporan keuangan.

Fokus utama dalam penelaahan ini antara lain:

1) Penerapan kebijakan kapitalisasi yang tepat

Auditor harus menilai apakah perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menentukan apakah pengeluaran yang meningkatkan manfaat ekonomi masa depan sudah dikapitalisasi sedangkan pengeluaran seperti biaya perawatan rutin dan perbaikan kecil tidak dikapitalisasi karena tidak menambah nilai atau umur manfaat aset secara signifikan.

2) Ketepatan pencatatan penghapusan atau pelepasan aset

Aset yang sudah rusak, tidak digunakan lagi, atau dijual kepada pihak lain harus dihapuskan dari pembukuan. Auditor harus menilai apakah perusahaan memiliki prosedur dokumentasi atas pelepasan aset seperti berita acara, faktur penjualan, atau surat pelepasan.

3) Melakukan revaluasi atau penurunan nilai jika dibutuhkan

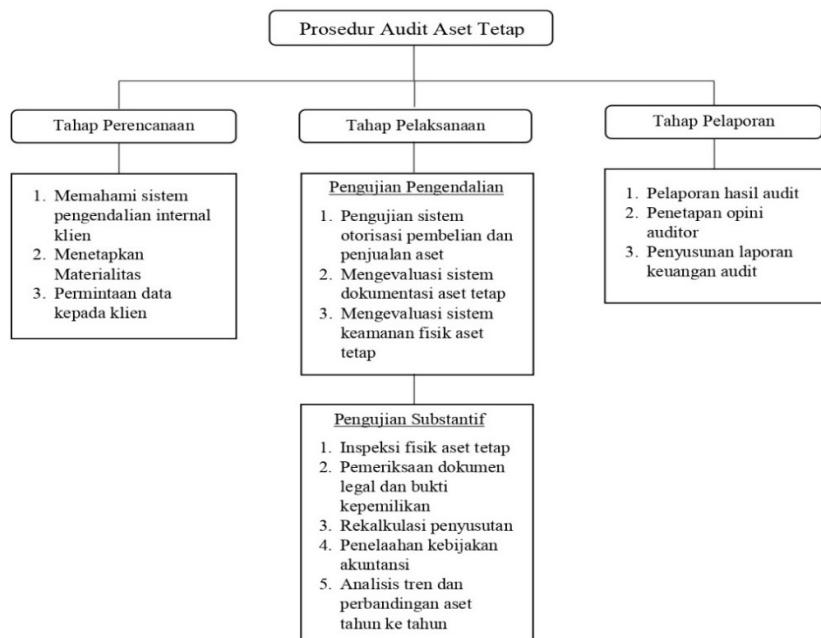
Auditor perlu mengevaluasi apakah perusahaan perlu melakukan revaluasi nilai aset tetap atau melakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat kemungkinan bahwa nilai yang tercatat dalam pembukuan melebihi nilai yang seharusnya, misalnya jika aset mengalami kerusakan yang berat hingga perubahan kondisi pasar atau regulasi yang menjadikan aset tidak produktif.

e. Analisis tren dan perbandingan tahun ke tahun

Auditor juga perlu melakukan analisis horizontal dan vertikal terhadap akun aset tetap dan beban penyusutan dari satu periode ke periode lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam nilai aset tetap, menelusuri penambahan aset baru atau penghapusan aset lama, serta memastikan bahwa fluktuasi beban penyusutan sejalan dengan perubahan nilai buku aset tetap.

4) Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur audit. Auditor mengevaluasi semua bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, khususnya yang berkaitan dengan aset tetap. Seluruh dokumentasi dan kertas kerja diperiksa ulang untuk memastikan kelengkapan dan konsistensinya. Apabila ditemukan kelemahan dalam pengendalian atau pencatatan aset tetap, auditor akan menyampaikan temuan tersebut beserta rekomendasi perbaikannya. Dari hasil evaluasi, auditor merumuskan opini audit.



Sumber: Arens *et al.*, 2017

Gambar 1. Prosedur Audit Aset Tetap

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hal yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa laporan keuangan perusahaan jasa pelayaran A yang diaudit oleh KAP DJS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, dimana peneliti secara

langsung terlibat dalam kegiatan audit serta dokumentasi dengan mempelajari dokumen yang diperiksa. Meskipun tidak melakukan wawancara informal, individu yang diamati berperan sebagai informan implisit karena perilaku dan pengalaman mereka menjadi sumber utama dalam penyusunan data. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga informan yang terdiri dari pimpinan, supervisor, serta auditor dari KAP DJS. Observasi dilakukan selama kegiatan magang dengan jangka waktu lima bulan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian berupa kertas kerja pemeriksaan, daftar aset tetap, dan laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Audit adalah tahapan sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk menilai dan memverifikasi apakah penyajian laporan keuangan telah sesuai dan wajar sesuai dengan standar yang berlaku. Prosedur audit aset tetap yang dilaksanakan oleh KAP DJS pada perusahaan jasa pelayaran dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporan.

Auditor perlu melakukan tahap perencanaan audit sebelum memulai kegiatan pemeriksaan. Pada tahap ini, auditor KAP DJS mempelajari sistem pengendalian internal klien terhadap aset tetap serta menentukan tingkat materialitas untuk mengidentifikasi risiko audit sehingga dapat menentukan area yang membutuhkan fokus lebih dalam proses pemeriksaan. Auditor KAP DJS menetapkan aset tetap yang membutuhkan fokus lebih adalah kapal dan tongkang. Hal ini dikarenakan kapal dan tongkang memiliki nilai aset yang cukup tinggi, mobilitas yang tidak statis yang menimbulkan kendala ketika hendak melakukan inspeksi fisik sehingga perlu dilakukan pengujian atas eksistensi dan legalitas kepemilikan, serta perlakuan akuntansi yang kompleks misalnya seperti pengeluaran biaya perawatan (*docking*) yang perlu dianalisis apakah biaya tersebut bisa dikapitalisasi atau harus dibebankan pada periode berjalan.

Selain menentukan area yang membutuhkan prosedur audit mendalam, pada tahap ini auditor KAP DJS meminta data yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung. Data yang dibutuhkan harus lengkap dan komprehensif, mencakup semua informasi yang relevan dengan tujuan audit (Sari, 2021). Data yang dibutuhkan untuk melaksanakan prosedur audit aset tetap yaitu:

- a. Laporan keuangan.
- b. Buku besar aset tetap.

- c. Daftar aset perusahaan dilengkapi tabel perhitungan penyusutan.
- d. Bukti kepemilikan aset tetap.
- e. Bukti transaksi pengadaan aset dan pelepasan aset.
- f. Bukti penyelesaian pemeliharaan (*docking*) kapal.

Bukti audit menjadi elemen kunci dalam keberhasilan pelaksanaan prosedur audit. Tanpa bukti yang cukup, auditor tidak dapat meyakini eksistensi, penilaian, dan hak kepemilikan atas aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan SA 500 tentang Bukti Audit yang menyatakan bahwa auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung opini yang ditetapkan. SA 500 menjadi acuan utama dalam membuktikan kelengkapan dan ketepatan bukti (Ramadhani & Triani, 2022). Kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung dalam pelaksanaan audit menjadi aspek krusial yang membutuhkan perhatian auditor.

Data yang telah dikumpulkan oleh auditor KAP DJS menjadi dasar pelaksanaan proses audit. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian perusahaan dalam mendokumentasikan aset tetap ke dalam kartu aset serta memeriksa apakah dalam transaksi pengadaan dan pelepasan aset yang terjadi pada periode berjalan telah dilengkapi otorisasi oleh pihak yang berwenang. Setelah melakukan pengujian pengendalian, dilakukan pengujian substantif untuk memastikan keberadaan dan kewajaran nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Auditor melakukan pengujian substantif berupa rekonsiliasi saldo buku besar dengan daftar aset sebagai langkah awal dalam pelaksanaan proses audit. Prosedur rekonsiliasi dilakukan dengan menelusuri setiap saldo akhir pada buku besar kemudian mencocokkannya dengan rincian jumlah unit, harga perolehan, akumulasi penyusutan, serta nilai buku aset pada daftar aset tetap. Auditor perlu memastikan kesesuaian saldo awal dengan saldo audit periode sebelumnya untuk memastikan bahwa saldo awal yang digunakan telah sesuai. Pada periode audit 2024, auditor KAP DJS menemukan perbedaan saldo awal dengan saldo audit tahun 2023 pada akun kendaraan dan perlengkapan kantor sebesar Rp6.075.000. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa klien belum menyesuaikan hasil audit tahun 2023 dengan data buku besar yang mereka miliki, namun setelah dilakukan pemeriksaan ke dalam mutasi buku besar aset tetap ditemukan bahwa klien sudah melakukan penyesuaian saldo awal terhadap akun-akun tersebut.

Auditor KAP DJS juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan aset tetap. Dokumen kepemilikan yang dibutuhkan adalah sertifikat hak milik atas bangunan dan tanah, BPKB kendaraan, akta kepemilikan kapal dan tongkang, serta faktur pembelian aset. Pemeriksaan bukti kepemilikan ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset tetap yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar dimiliki secara sah oleh perusahaan. Pada tahap ini, auditor memastikan keaslian dan masa berlaku dokumen, serta memastikan konsistensi antara dokumen legal dengan catatan akuntansi. Sesuai dengan SA 500 tentang bukti audit, keberadaan dokumen yang sah, dapat diverifikasi dan dapat ditelusuri menjadi syarat mutlak bagi auditor untuk mendapatkan keyakinan dalam menilai kewajaran saldo aset tetap (Sasongko et al., 2024).

Prosedur pemeriksaan fisik menjadi salah satu prosedur penting dalam proses audit. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset benar-benar ada dan berada dalam kondisi fisik yang masih layak untuk digunakan. Pemeriksaan ini menjadi tantangan tersendiri dalam sektor jasa pelayaran karena aset tetap berupa kapal tidak selalu berada di lokasi. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan nama kapal, nomor seri kapal, dan atribut fisik lainnya. Kendala yang dialami oleh auditor KAP DJS dalam melakukan pemeriksaan fisik aset kapal adalah ketika semua kapal yang dimiliki klien sedang beroperasi dan tidak ada kapal yang berlabuh sedangkan auditor belum menerapkan prosedur alternatif dengan verifikasi melalui *logbook* pelayaran dan GPS *tracking*, sehingga keberadaan fisik kapal tidak dapat terdeteksi. Proses pemeriksaan fisik dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan sebagai bukti bahwa prosedur audit telah dilaksanakan.

Auditor KAP DJS melakukan rekalkulasi serta evaluasi terhadap kebijakan penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Auditor meninjau metode penyusutan yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan karakteristik dan masa manfaat aset, serta memastikan bahwa metode yang digunakan konsisten dengan metode yang digunakan pada periode-periode sebelumnya. Aset tetap yang dimiliki disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu dengan umur manfaat sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Penyusutan Aset Tetap Perusahaan Jasa Pelayaran A

Aset Tetap	Tarif Penyusutan	Masa Manfaat
------------	------------------	--------------

Perlengkapan kantor	25%	4 tahun
Kendaraan	12,5%	8 tahun
Kapal dan Tongkang	6,25%	16 tahun
Bangunan	5%	20 tahun

Sumber: KAP DJS

Auditor perlu memastikan bahwa nilai aset yang disusutkan sudah termasuk pengeluaran biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi. Pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan aset tetap seperti kapal membutuhkan jumlah yang cukup material dan memiliki pengaruh terhadap perlakuan akuntansi aset tetap. Auditor KAP DJS melakukan evaluasi apakah biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan kapal diakui sebagai beban operasional atau dikapitalisasi sebagai penambahan nilai aset. Hal ini menjadi penting karena kesalahan dalam pengklasifikasian dapat menyebabkan salah saji yang cukup material pada laporan keuangan. Auditor menelusuri dokumen pengeluaran seperti *invoice docking*, perbaikan hingga penggantian komponen mesin kapal, biaya pengecatan ulang, dan biaya pemeliharaan lainnya. Hanya pengeluaran yang meningkatkan manfaat ekonomis di masa depan misalnya penggantian mesin kapal yang dapat dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran yang tidak meningkatkan manfaat ekonomis di masa depan diakui sebagai beban (Sutjipto, 2005). Perlakuan akuntansi tersebut tidak hanya berlaku untuk kapal saja, tetapi juga berlaku untuk aset tetap lainnya.

Auditor KAP DJS melakukan prosedur pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan dan pelepasan aset tetap selama periode yang diaudit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan benar. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan aset tetap, auditor memastikan bahwa harga perolehan yang diakui sudah mengakumulasi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk transaksi pelepasan aset, auditor mengevaluasi apakah aset telah dikeluarkan dari catatan milik perusahaan serta meninjau apakah terdapat keuntungan atau kerugian yang timbul atas pelepaan aset tersebut karena hal ini akan berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Transaksi pelepasan aset tetap harus memiliki dokumen pelepasan serta bukti penghapusan dari catatan akuntansi yang disetujui oleh manajemen.

Prosedur terakhir dalam audit aset tetap yang dilaksanakan oleh auditor KAP DJS adalah memeriksa kembali kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa nilai yang disajikan telah wajar. Dari hasil

pemeriksaan secara menyeluruh, auditor menetapkan opini audit laporan keuangan. Setelah itu, auditor mempersiapkan pelaporan atas audit laporan keuangan. Auditor KAP DJS meninjau aspek pelaporan dan pengungkapan informasi aset tetap dalam laporan keuangan, terutama pada catatan atas laporan keuangan. Auditor harus memastikan bahwa seluruh aspek penting telah diungkapkan secara lengkap, termasuk kebijakan akuntansi atas aset tetap, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat aset, mutasi aset selama tahun berjalan, serta nilai tercatat aset tetap pada akhir periode berjalan. Pengungkapan juga mencakup informasi aset yang dijaminkan, aset dalam proses, hingga informasi terkait penurunan nilai aset. Pengungkapan informasi ini menekankan pentingnya kredibilitas serta keterbukaan informasi kepada pengguna laporan keuangan (Suteja et al., 2014).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur audit aset tetap pada perusahaan sektor pelayaran yang dilaksanakan oleh KAP DJS telah dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penetapan materialitas dan identifikasi risiko pada tahap perencanaan sejalan dengan prinsip dalam SA 315 tentang identifikasi risiko dan SA 320 tentang materialitas. Hal ini menjadi acuan bagi auditor dalam menentukan area pemeriksaan bagi aset tetap yang memiliki risiko tinggi terhadap salah saji material. Pelaksanaan prosedur audit secara menyeluruh serta adanya bukti audit yang cukup dan tepat sebagaimana yang tercantum dalam SA 500 memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan terbebas dari salah saji material. Bukti audit tidak hanya menjadi dasar validasi keberadaan fisik dan legalitas kepemilikan aset, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai apakah pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kecukupan dan ketepatan dokumen dapat mendukung seluruh proses audit aset tetap sehingga dapat menurunkan risiko salah saji serta menambah keyakinan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan.

Pelaksanaan pengujian substantif dalam proses audit yang dilakukan oleh KAP DJS membuktikan bahwa pengujian terhadap saldo aset tetap merupakan alat penting yang digunakan untuk menguji konsistensi dan keberlanjutan informasi keuangan. Pemeriksaan fisik terhadap aset menjadi salah satu hal yang krusial untuk dilaksanakan, namun pada perusahaan jasa pelayaran seringkali mengalami kendala dalam proses

pemeriksaan fisik kapal. Penggunaan teknologi untuk melacak posisi kapal yang sedang beroperasi dapat membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fisik aset tetap. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyudi & Wijaya (2024) yang menyatakan bahwa teknologi audit meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses audit. Peningkatan transparansi atas pelaksanaan prosedur audit menjadi pondasi dalam menjamin kualitas dan keandalan hasil audit. Sehingga pelaksanaan prosedur audit yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku mulai dari tahap perencanaan yang matang, pengumpulan bukti yang relevan, serta penerapan praktik audit berbasis risiko menjadi pendekatan yang penting dalam mendeteksi salah saji material serta memberikan keyakinan atas opini yang diberikan oleh auditor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Audit aset tetap menjadi bagian penting dalam proses audit laporan keuangan karena aset tetap memiliki nilai yang cukup material serta perlakuan akuntansi yang kompleks. KAP DJS telah melaksanakan prosedur audit aset tetap secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan sesuai dengan standar audit dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada tahap perencanaan, auditor telah mengidentifikasi area berisiko tinggi serta mengumpulkan data yang cukup dan relevan untuk mendukung proses audit. Pada tahap pelaksanaan, auditor telah melakukan beberapa pengujian untuk menilai kewajaran aset tetap. Namun terdapat kekurangan pada prosedur pemeriksaan fisik, dimana auditor hanya memeriksa kapal yang sedang berlabuh tanpa menggunakan prosedur alternatif seperti verifikasi melalui *logbook* pelayaran atau *GPS tracking*. Pada tahap pelaporan dan pengungkapan auditor telah menjelaskan seluruh aspek penting terkait aset tetap ke dalam catatan atas laporan keuangan.

Dengan demikian, pelaksanaan prosedur audit aset tetap yang dilakukan oleh KAP DJS telah memadai dan sesuai dengan standar. Namun, masih terdapat ruang perbaikan dalam penerapan prosedur alternatif pemeriksaan fisik untuk aset yang memiliki mobilitas tinggi. Sehingga peneliti menyarankan agar KAP DJS dapat menerapkan prosedur alternatif ketika melakukan pemeriksaan fisik kapal, sehingga meskipun semua kapal beroperasi keberadaan kapal dapat dideteksi dan meningkatkan efektivitas serta kelengkapan prosedur audit

DAFTAR REFERENSI

- n.ac.id/1528/1/Laporan Magang Fadilah Rochmawati 111729484.pdf
- Rohendi, H. (2017). Pengaruh Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Rumah Sakit Cicendo. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(September), 22–47.
<http://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/article/download/139/44>
- Sandyardhita, S., & Habibi, M. L. (2024). *Prosedut Audit Stock Opname Di KAP Gideon Adi & Rekan dalam Mengungkap Kesalahan Pencatatan Persediaan PT XYZ*. 9(8).
- Sari, E. S. O. (2021). Prosedur Pengauditan Atas Piutang Usaha pada PT. Abc oleh KAP MNK & Partners Cabang Surakarta. *Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia*, 1–38. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29640>
- Sasongko, A. W., Nugraha, F. K., Alam, M. D., & Saputri, R. D. A. (2024). Prosedur Audit Substantif Primer. *Researchgate.Net*, May.
https://www.researchgate.net/profile/Ananta-Wahyu-Sasongko/publication/380979877_Prosedur_Audit_Substantif_Primer/links/66614e60de777205a3112954/Prosedur-Audit-Substantif-Primer.pdf
- Smith, J. L., & Skousen, K. F. (2003). *Introduction to Financial Accounting*. Thomson Learning.
- Suci, B. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal. *Jurnal Economina*, 2(7), 1767–1776. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.672>
- Suteja, J., Rusliati, E., & Gunardi, A. (2014). *Modul Praktika Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. June.
- Sutjipto, E. (2005). *Intermediate Accounting II* (Issue October).
- Suyudi, S. S. A., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2024). *Analisis Peranan Teknologi Audit Internal dalam Mendukung Kinerja Auditor*. 1(4), 277–283.
- Waluyo, N. M., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2024). *Penerapan Sikap Profesionalisme Auditor pada Pemeriksaan Aset dan Kas KAP Rudiana Fibriani*. 2.